

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran atau kecurangan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengukuran atau penimbangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Belum tegasnya sikap pemerintah terkait alat takar dan timbangan barang, yaitu Dinas Metrologi, khususnya di kota Surabaya, semakin merugikan konsumen. Oleh karena itu diharapkan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dapat lebih diterapkan dengan tegas agar konsumen merasa aman dan tidak lagi merasa dirugikan oleh pedagang-pedagang yang curang.

